

**PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN (477374)**

# **LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2020**

Jl. Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun

SAROLANGUN - Jambi 37481

Telp. 0745-91006 Fax. 0745-91006

e-mail : sarolangun\_pn@yahoo.co.id



# **LAPORAN KEUANGAN**

## **PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020**

**BAGIAN ANGGARAN 005.01**

**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Komplek Perkantoran Gunung Kembang**

**Telp. 0745-91006 Fax. 0745-91006**

**Sarolangun - Jambi 37481**

**e-mail : sarolangun\_pn@yahoo.co.id**

# *KATA PENGANTAR*

# Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Sarolangun adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sarolangun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sarolangun, 10 Januari 2020  
Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,

JULIADI, S.Kom  
NIP. 198507012009041003

# *DAFTAR ISI*

# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel.....	iv
Pernyataan Tanggung Jawab .....	vi
Ringkasan .....	vii
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	1
II. Neraca .....	2
III. Laporan Operasional .....	3
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	4
V. Catatan atas Laporan Keuangan .....	5
A. Penjelasan Umum .....	5
A.1. Dasar Hukum.....	5
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Sarolangun.....	6
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	7
A.4. Basis Akuntansi.....	8
A.5. Dasar Pengukuran .....	8
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	15
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah .....	15
B.2. Belanja.....	16
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	20
C.1. Aset Lancar .....	20
C.2. Aset Tetap .....	22
C.3. Aset Lainnya .....	26
C.4. Kewajiban Jangka Pendek .....	28
C.5. Ekuitas .....	29
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional .....	30
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	30
D.2. Beban Pegawai .....	30
D.3. Beban Persediaan.....	31
D.4. Beban Barang dan Jasa.....	31

D.5.	Beban Pemeliharaan .....	32
D.6.	Beban Perjalanan Dinas .....	33
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat .....	33
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	34
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi .....	34
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih.....	35
D.11.	Beban Lain-lain .....	36
D.12.	Kegiatan Non Operasional .....	36
D.13.	Pos Luar Biasa.....	37
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	38
E.1.	Ekuitas Awal .....	38
E.2.	Surplus/Defisit - LO .....	38
E.3.	Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar .....	38
E.3.3.	Koreksi Atas Reklasifikasi .....	40
E.3.4.	Selisih Revaluasi Aset Tetap .....	40
E.3.5.	Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi.....	40
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	41
E.5.	Kenaikan/Penurunan Entitas.....	41
E.6.	Ekuitas Akhir.....	42
F.	Pengungkapan Penting Lainnya .....	43
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca .....	43
F.2.	Pengungkapan Lain-lain .....	43

Daftar dan Lampiran

# *DAFTAR TABEL*

# Daftar Tabel

Tabel 1. Penggolongan Kualitas Piutang .....	11
Tabel 2. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap .....	13
Tabel 3. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud .....	14
Tabel 4. Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 31 Desember 2020.....	15
Tabel 5. Perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019.....	16
Tabel 6. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2020 .....	16
Tabel 7. Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019.....	17
Tabel 8. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 .....	18
Tabel 9. Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 .....	19
Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 .....	19
Tabel 11. Rincian Aset Lancar per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 .....	20
Tabel 12. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 .....	21
Tabel 13. Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 .....	21
Tabel 14. Persediaan per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019.....	22
Tabel 15. Aset Tetap per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 .....	23
Tabel 16. Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2020.....	23
Tabel 17. Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 .....	24
Tabel 18. Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020.....	24
Tabel 19. Mutasi Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020.....	25
Tabel 20. Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 .....	25
Tabel 21. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 .....	26
Tabel 22. Aset Lainnya per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 .....	27
Tabel 23. Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020.....	27
Tabel 24. Mutasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 .....	28
Tabel 25. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 .....	28
Tabel 26. PNBPN per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019.....	30
Tabel 27. Beban Pegawai per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 .....	31
Tabel 28. Beban Persediaan per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019.....	31
Tabel 29. Beban Barang dan Jasa per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019.....	32
Tabel 30. Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 .....	32
Tabel 31. Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019.....	33

Tabel 32. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat.....	34
Tabel 33. Beban Bantuan Sosial per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 .....	34
Tabel 34. Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 .....	35
Tabel 35. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 .....	36
Tabel 36. Beban Lain-lain per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 .....	36
Tabel 37. Kegiatan Non Operasional per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019.....	37
Tabel 38. Pos Luar Biasa per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019.....	37
Tabel 39. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas .....	38
Tabel 40. Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 .....	39
Tabel 41. Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2020 .....	40
Tabel 42. Koreksi Lain-lain per 31 Desember 2020.....	41

# *PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB*

## Pengadilan Negeri Sarolangun

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun - Jambi 36163

Telp. 0745-91006 Fax. 0745-91006 e-mail : sarolangun\_pn@yahoo.co.id

---

### Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sarolangun telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

SAROLANGUN, 10 Januari 2020

Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,

JULIADI, S.Kom

NIP. 198507012009041003

# *RINGKASAN*

# Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 3.787.000,- atau mencapai 150,61 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 2.515.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp. 4.110.461.296,- atau mencapai 98 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 4.194.357.000,-.

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2020 dan 2019.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 6.148.028.587,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 1.997.200,-; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 6.146.031.387,-; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp. 0,-; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0,-.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 21.598.413,-; yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 21.598.413,-; dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp. 0,-.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp. 6.126.430.174,-.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/(defisit) dari operasi, surplus/(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/(defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 3.787.854,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 4.147.335.258,- sehingga terdapat surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 4.143.547.404,-). Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa masing-masing surplus/(defisit) sebesar Rp. 87.500,- dan sebesar Rp. 0,-, sehingga entitas mengalami surplus/(defisit) - LO sebesar (Rp. 4.143.459.904,-).

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp. 5.570.961.886,-, dikurangi Surplus/(defisit)-LO sebesar (Rp. 4.143.459.904,-), dikurangi dengan Koreksi-koreksi sebesar (Rp. 200.080.250,-), ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 4.899.008.442,-, dan ditambah Kenaikan/penurunan Ekuitas sebesar Rp. 555.468.288,-, sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp. 6.126.430.174,-.

## 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2020, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

# *I. LRA PERBANDINGAN*

# I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
*( dalam satuan Rupiah )*

Uraian	Catatan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	%
<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>B.1.</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1.	2.515.000	3.787.854	150,61	2.429.588	96,60
<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah</b>		<b>2.515.000</b>	<b>3.787.854</b>	<b>150,61</b>	<b>2.429.588</b>	<b>96,60</b>
<b>Belanja Negara</b>	<b>B.2.</b>					
Belanja Pegawai	B.2.1.	2.799.837.000	2.793.862.990	99,79	2.157.460.702	99,75
Belanja Barang	B.2.2.	1.033.140.000	974.598.306	94,33	792.611.477	98,65
Belanja Modal	B.2.3.	361.380.000	342.000.000	94,64	40.035.000	98,85
<b>Jumlah Belanja Negara</b>		<b>4.194.357.000</b>	<b>4.110.461.296</b>	<b>98,00</b>	<b>2.990.107.179</b>	<b>99,45</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *II. NERACA PERBANDINGAN*

## II. Neraca

**PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
*(dalam satuan Rupiah)*

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>	<b>C.1.</b>		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.2.	0	0
Persediaan	C.1.3.	1.997.200	2.042.500
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>1.997.200</b>	<b>2.042.500</b>
<b>Aset Tetap</b>	<b>C.2</b>		
Tanah	C.2.1.	699.300.000	699.300.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	2.179.725.504	1.837.725.504
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	5.352.628.750	4.560.293.750
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	30.792.000	30.792.000
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	47.640.950	47.640.950
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2.6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7.	(2.164.055.817)	(1.598.693.550)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>6.146.031.387</b>	<b>5.577.058.654</b>
<b>Aset Lainnya</b>	<b>C.3</b>		
Aset Tak Berwujud	C.3.1.	0	0
Aset Lain-Lain	C.3.2.	323.586.300	323.586.300
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3.	(323.586.300)	(323.586.300)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>6.148.028.587</b>	<b>5.579.101.154</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>C.4.</b>		
Uang Muka dari KPPN	C.4.1.	0	0
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.2.	21.598.413	8.139.268
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>21.598.413</b>	<b>8.139.268</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>21.598.413</b>	<b>8.139.268</b>
<b>EKUITAS</b>			
<b>Ekuitas Dana Lancar</b>	<b>C.5.</b>		
<b>Jumlah Ekuitas Dana</b>		<b>6.126.430.174</b>	<b>5.570.961.886</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana</b>		<b>6.148.028.587</b>	<b>5.579.101.154</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

### *III. LAPORAN OPERASIONAL*

### III. Laporan Operasional

**PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
*(dalam satuan Rupiah)*

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>Kegiatan Operasional</b>			
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1.	3.787.854	2.429.402
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>3.787.854</b>	<b>2.429.402</b>
<b>Beban</b>			
Beban Pegawai	D.2.	2.794.342.872	2.156.593.171
Beban Persediaan	D.3.	28.243.700	34.716.536
Beban Barang dan Jasa	D.4.	631.705.108	502.001.763
Beban Pemeliharaan	D.5.	308.214.174	189.626.584
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	19.547.387	70.575.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	0	0
Beban Bantuan Sosial	D.8.	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9.	365.282.017	287.182.616
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10.	0	0
Beban Lain-lain	D.11.	0	0
<b>Jumlah Beban</b>		<b>4.147.335.258</b>	<b>3.240.695.670</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>(4.143.547.404)</b>	<b>(3.238.266.268)</b>
<b>Kegiatan Non Operasional</b>			
<b>D.12.</b>			
<b>Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		100.300	204.586
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		12.800	312.500
<b>Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>		<b>87.500</b>	<b>(107.914)</b>
<b>Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>87.500</b>	<b>(107.914)</b>
<b>Pos Luar Biasa</b>			
<b>D.13.</b>			
Beban Luar Biasa		0	0
<b>Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Surplus/(Defisit) - Laporan Operasional</b>		<b>(4.143.459.904)</b>	<b>(3.238.374.182)</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS*

## IV. Laporan Perubahan Ekuitas

### PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun)	%
Ekuitas Awal	E.1.	5.570.961.886	5.548.317.487	22.644.399	0,40
Surplus/(Defisit) - Laporan	E.2.	(4.143.459.904)	(3.238.374.182)	(905.085.722)	27,94
Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas					
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.	0	0	0	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.	0	0	0	0,00
Koreksi Atas Reklasifikasi		(1.996.500)	0	(1.996.500)	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.5.	0	102.273.000	(102.273.000)	(100,00)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.6.	(198.083.750)	165.800	(198.249.550)	(119.571,50)
Koreksi Lain-lain	E.7.	0	0	0	0
Jumlah Koreksi		(200.080.250)	102.438.800	(302.519.050)	(295,31)
Transaksi Antar Entitas	E.8.	4.899.008.442	3.158.579.781	1.740.428.661	55,10
Kenaikan / Penurunan Ekuitas	E.9.	555.468.288	22.644.399	532.823.889	2.353,00
Ekuitas Akhir		6.126.430.174	5.570.961.886	555.468.288	9,97

\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

## *V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

## V. Catatan atas Laporan Keuangan

### A. Penjelasan Umum

#### A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;

- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; dan
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

## A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Sarolangun

Visi Pengadilan Negeri Sarolangun adalah **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Agung”** yang bertujuan agar Pengadilan Negeri Sarolangun menjadi lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya sehingga terbebas dari intervensi pihak-pihak luar dalam memutus suatu perkara.

Misi Pengadilan Negeri Sarolangun adalah:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun; dan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan beberapa langkah-langkah strategis. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun dapat diartikan sebagai suatu pengarah terhadap organisasi dan seluruh pegawai untuk mencapai tujuan organisasi sesuai renstra yang termuat Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program Kerja dan Kegiatan yang dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan Pengadilan Negeri Sarolangun melalui kebijakan yang dibuat oleh unsur pimpinan dengan pertimbangan potensi, peluang dan kendala-kendala yang ada yang telah disusun dalam 5 (lima) tahun ke depan 2015-2020.

Guna mempermudah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman dan proses tercapainya visi, misi,

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut Pengadilan Negeri Sarolangun menetapkan tujuan dan sasaran, antara lain:

a. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut yang lebih terarah dan operasional berupa rumusan strategis Pengadilan Negeri Sarolangun. Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Pengadilan Negeri Sarolangun telah menetapkan tujuan sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- 2) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- 3) Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan; serta
- 4) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

b. Sasaran

Adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu pendek, sasaran yang akan dicapai dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- 2) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- 3) Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; dan
- 4) Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

### A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan

SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya.

#### A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Sarolangun menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh

suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun adalah sebagai berikut:

### **(1.) Pendapatan LRA**

- ) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- ) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- ) Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### **(2.) Pendapatan LO**

- ) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- ) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - ✓ Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
  - ✓ Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - ✓ Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- ) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- ) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### **(3.) Belanja**

- ) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang

mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- ) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- ) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- ) Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **(4.) Beban**

- ) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- ) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- ) Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **(5.) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### **a. Aset Lancar**

- ) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- ) Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- ) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - ✓ Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila

telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- ✓ Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- ✓ harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- ✓ harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- ✓ harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

## b. Aset Tetap

- ) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- ) Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- ) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - ✓ Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
  - ✓ Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
  - ✓ Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- ) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- ) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

## c. Penyusunan Aset Tetap

- ) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- ) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - ✓ Tanah
  - ✓ Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - ✓ Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan

kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- ) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- ) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- ) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap**

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

#### **d. Piutang Jangka Panjang**

- ) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- ) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

#### **e. Aset Lainnya**

- ) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- ) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar

harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- ) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- ) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud**

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- ) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

## (6.) Kewajiban

- ) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- ) Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - ✓ Kewajiban Jangka Pendek
    - Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan

setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

✓ Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

**(7.) Ekuitas**

) Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran**

**B.1. Pendapatan Negara dan Hibah**

*Realisasi  
Pendapatan  
Negara dan  
Hibah: Rp.  
3.787.854,-*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 3.787.854,- atau mencapai 150,61 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 2.515.000,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Sarolangun adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

**Tabel 4. Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember 2020**  
*(dalam satuan Rupiah)*

Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.515.000	3.787.854	150,61
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	0	0	0,00
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00
<b>Total Pendapatan</b>	<b>2.515.000</b>	<b>3.787.854</b>	<b>150,61</b>

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.358.266,- atau 55.90 persen dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pendapatan jasa yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2020 dan TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5. Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
			Rp	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.787.854	2.429.588	1.358.266	55,90
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	0	0	0	0,00
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0	0,00
<b>Total Pendapatan</b>	<b>3.787.854</b>	<b>2.429.588</b>	<b>1.358.266</b>	<b>55,90</b>

## B.2. Belanja

*Realisasi Belanja Negara: Rp. 4.110.461.296,-*

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Sarolangun per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 4.110.461.296,- setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 98,00 persen dari anggaran senilai Rp. 4.194.357.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2020**  
(dalam satuan rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.799.837.000	2.793.862.990	99,79
Belanja Barang	1.033.140.000	974.598.306	94,33
Belanja Modal	361.380.000	342.000.000	94,64
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>4.194.357.000</b>	<b>4.110.461.296</b>	<b>98,00</b>
Pengembalian Belanja	0	1.295.101	0,00
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>4.194.357.000</b>	<b>4.109.166.195</b>	<b>97,97</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2020**  
(dalam satuan rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual Tahun 2020

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.120.354.117,- atau sebesar 37,47 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya penambahan pagu belanja pegawai sebesar Rp. 636.402.288,-, penambahan pagu belanja barang sebesar Rp. 181.986.829,- dan penambahan pagu belanja modal sebesar Rp. 301.965.000,- dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019.

Perbandingan realisasi belanja TA 2020 dan TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7. Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	2.793.862.990	2.157.460.702	636.402.288	29,50
Belanja Barang	974.598.306	792.611.477	181.986.829	22,96
Belanja Modal	342.000.000	40.035.000	301.965.000	754,25
<b>Total Belanja</b>	<b>4.110.461.296</b>	<b>2.990.107.179</b>	<b>1.120.354.117</b>	<b>37,47</b>

### B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja  
Pegawai: Rp.  
2.793.862.990,-

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Sarolangun per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 masing-masing sebesar Rp. 2.793.862.990,- dan Rp. 2.157.460.802,-.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 29,50 persen

dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2019. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan 7 (tujuh) orang Hakim pada Tahun 2020.

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai TA 2020 dan TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 8. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.031.105.040	954.094.760	77.010.280	8,07
Beban Pembulatan Gaji PNS	18.127	15.890	2.237	14,08
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	66.852.980	69.405.052	(2.552.072)	(3,68)
Beban Tunj. Anak PNS	20.420.570	18.858.266	1.562.304	8,28
Beban Tunj. Struktural PNS	28.140.000	30.010.000	(1.870.000)	(6,23)
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.266.290.000	749.880.000	516.410.000	68,87
Beban Tunj. PPh PNS	113.698.134	82.339.168	31.358.966	38,09
Beban Tunj. Beras PNS	52.287.240	50.683.360	1.603.880	3,16
Beban Uang Makan PNS	203.581.000	179.606.000	23.975.000	13,35
Beban Tunjangan Umum PNS	12.765.000	22.755.000	(9.990.000)	(43,90)
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>2.795.158.091</b>	<b>2.157.647.496</b>	<b>637.510.595</b>	<b>29,55</b>
Pengembalian Belanja	1.295.101	186.794	1.108.307	593,33
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>2.793.862.990</b>	<b>2.157.460.702</b>	<b>636.402.288</b>	<b>29,50</b>

## B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja  
Barang: Rp.  
974.598.306,-

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Sarolangun per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 masing-masing sebesar Rp. 974.598.306,- dan Rp. 792.611.477,-.

Realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 22,96 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2019. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan pagu anggaran belanja barang pada Pengadilan Negeri Sarolangun pada TA 2020 untuk belanja Langganan Internet, Pemeliharaan Rumah Dinas dan Sewa Rumah Dinas untuk Hakim.

Perbandingan realisasi Belanja Barang TA 2020 dan TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 9. Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Barang Operasional	618.725.845	501.275.993	117.449.852	23,43
Belanja Barang Persediaan	32.662.000	40.908.650	(8.246.650)	(20,16)
Belanja Barang Non Operasional	0	0	0	0,00
Belanja Jasa	0	714.000	(714.000)	(100,00)
Belanja Pemeliharaan	303.663.074	180.802.834	122.860.240	68,58
Belanja Perjalanan Dinas	19.547.387	68.910.000	(49.362.613)	(71,63)
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>974.598.306</b>	<b>792.611.477</b>	<b>181.986.829</b>	<b>23,01</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>974.598.306</b>	<b>792.611.477</b>	<b>181.986.829</b>	<b>23,01</b>

### B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja  
Modal: Rp.  
342.000.000,-

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Sarolangun per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 masing-masing sebesar Rp. 342.000.000,- dan Rp. 40.035.000,-.

Realisasi Belanja Modal TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 754,25 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2019. Hal ini disebabkan karena adanya pagu anggaran untuk belanja modal kendaraan bermotor roda 4 sebanyak 1 unit pada TA 2020.

Perbandingan realisasi Belanja Modal TA 2020 dan TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	342.000.000	40.035.000	301.965.000	754,25
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>342.000.000</b>	<b>40.035.000</b>	<b>301.965.000</b>	<b>754,25</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>342.000.000</b>	<b>40.035.000</b>	<b>301.965.000</b>	<b>754,25</b>

## C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

### C.1. Aset Lancar

*Aset Lancar: Rp  
1.997.200,-*

Nilai Aset Lancar per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 masing-masing sebesar Rp. 1.997.200,- dan Rp. 2.042.500,-.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Perbandingan Aset Lancar per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 11. Rincian Aset Lancar per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Belanja Dibayar di Muka	0	0
Persediaan	1.997.200	2.042.500
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>1.997.200</b>	<b>2.042.500</b>

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara  
Pengeluaran: Rp  
.0,-*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 masing-masing Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Kas Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019  
(dalam satuan rupiah)

Jenis	TA 2020	TA 2019
Kas Tunai	0	0
Uang di rekening bank	0	0
Kuitansi yang belum di SPM GU	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja Dibayar di Muka: Rp. 0,-*

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 masing-masing Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Perbandingan Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019  
(dalam satuan rupiah)

Jenis	TA 2020	TA 2019
Belanja Dibayar di Muka	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### C.1.3. Persediaan

*Persediaan: Rp. 1.997.200,-*

Persediaan per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 masing-masing sebesar Rp. 1.997.200,- dan Rp. 2.042.500,-.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Perbandingan Persediaan per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 dapat dilihat pada

tabel berikut:

**Tabel 14. Persediaan per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	TA 2019
1.	Barang Konsumsi	1.997.200	2.042.500
2.	Amunisi	0	0
3.	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4.	Suku Cadang	0	0
5.	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6.	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7.	Bahan Baku	0	0
8.	Barang dalam Proses	0	0
9.	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10.	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11.	Persediaan lainnya	0	0
<b>Total</b>		<b>1.997.200</b>	<b>2.042.500</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Nilai Persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil berita acara opname fisik tanggal 31 Desember 2020.

## C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap: Rp.  
6.146.031.387,-*

Nilai Aset Tetap per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 masing-masing sebesar Rp. 6.146.031.387,- dan Rp. 5.577.058.654,-.

Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Perbandingan Aset Tetap per 31 Desember TA 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 15. Aset Tetap per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019  
(dalam satuan rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan
1.	Tanah	699.300.000	699.300.000	0
2.	Peralatan dan Mesin	2.179.725.504	1.837.725.504	342.000.000
3.	Gedung dan Bangunan	5.352.628.750	4.560.293.750	792.335.000
4.	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	30.792.000	30.792.000	0
5.	Aset Tetap Lainnya	47.640.950	47.640.950	0
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>8.310.087.204</b>	<b>7.175.752.204</b>	<b>1.134.335.000</b>
Akumulasi Penyusutan		(2.164.055.817)	(1.598.693.550)	(565.362.267)
<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>		<b>6.146.031.387</b>	<b>5.577.058.654</b>	<b>568.972.733</b>

### C.2.1. Tanah

Tanah: Rp.  
699.300.000,-

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 masing-masing sebesar Rp. 699.300.000,- dan Rp. 699.300.000,-.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2020

No.	KIB	Luas (m <sup>2</sup> )	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	2.01.01.04.001.3	9.458	Sertifikat Hak Pakai No. 40	Pemerintah Kabupaten Sarolangun	Gedung Kantor	472.900.000
2.	2.01.01.01.001.1	4.528	900/533/DPP KAD	Pemerintah Kabupaten Sarolangun	Rumah Dinas	226.400.000
<b>Jumlah</b>						<b>699.300.000</b>

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan  
Mesin: Rp.  
2.179.725.504,-

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 masing-masing sebesar Rp. 2.179.725.504,- dan Rp. 1.837.725.504,-.

Mutasi nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17. Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020

Saldo per 31 Desember 2019	1.837.725.504
Mutasi Tambah	458.674.800
Mutasi Kurang	116.674.800
Saldo per 31 Desember 2020	2.179.725.504
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(1.582.557.629)
Nilai Buku 31 Desember 2020	597.167.875

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan Bangunan: Rp. 5.352.628.750,-*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 masing-masing sebesar Rp. 5.352.628.750,- dan Rp. 4.560.293.750,-.

Mutasi nilai terhadap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18. Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020

Saldo per 31 Desember 2019	4.560.293.750
Mutasi Tambah	1.584.670.000
Mutasi Kurang	792.335.000
Saldo per 31 Desember 2020	5.352.628.750
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(550.706.188)
Nilai Buku 31 Desember 2020	4.801.922.562

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Jalan, Irigasi, dan Jaringan: Rp. 30.792.000,-*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 masing-masing sebesar Rp. 30.792.000,- dan Rp. 30.792.000,-.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19. Mutasi Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020

Saldo per 31 Desember 2019	30.792.000
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2020	30.792.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(30.792.000)
Nilai Buku 31 Desember 2020	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

#### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap Lainnya: Rp. 47.640.950,-*

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 masing-masing sebesar Rp. 47.640.950,- dan Rp. 47.640.950,-.

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20. Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020

Saldo per 31 Desember 2019	47.640.950
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2020	47.640.950
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	0
Nilai Buku 31 Desember 2020	47.640.950

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

#### C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam Pengerjaan: Rp. 0,-*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

### C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
tetap: Rp.  
(2.164.055.817,-)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 masing-masing sebesar Rp. (2.164.055.817,-) dan Rp. (1.598.693.550,-).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 21. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020**  
(dalam satuan rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	Tanah	699.300.000	0	699.300.000
2.	Peralatan dan Mesin	2.179.725.504	(1.582.557.629)	597.167.875
3.	Gedung dan Bangunan	5.352.628.750	(550.706.188)	4.801.922.562
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	30.792.000	(30.792.000)	0
5.	Aset Tetap Lainnya	47.640.950	0	47.640.950
<b>Jumlah</b>		<b>8.310.087.204</b>	<b>(2.164.055.817)</b>	<b>6.146.031.387</b>

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.3. Aset Lainnya

*Aset Lainnya:  
Rp. 323.586.300,-*

Nilai Perolehan Aset Lainnya per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 masing-masing sebesar Rp. 323.586.000,- dan Rp. 323.586.000,-.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Perbandingan nilai Aset Lainnya per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 22. Aset Lainnya per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019  
(dalam satuan rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019
Aset Tak Berwujud	0	0
Aset Lain-lain	323.586.300	323.586.300
<b>Nilai Perolehan</b>	<b>323.586.300</b>	<b>323.586.300</b>
Akumulasi Penyusutan	(323.586.300)	(323.586.300)
<b>Nilai Buku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### C.3.1. Aset Tak Berwujud

*Aset Tak Berwujud:  
Rp. 0,-*

Saldo aset tak berwujud per 31 Desember TA 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Aset tak berwujud merupakan barang milik negara (BMN) yang digunakan dalam operasional Pengadilan Negeri Sarolangun berupa Software Komputer.

Mutasi aset tak berwujud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23. Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020  
(dalam satuan rupiah)

Saldo per 31 Desember 2019	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>0</b>

### C.3.2. Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain:  
Rp. 323.586.300,-*

Saldo aset lain-lain per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 323.586.300,- dan Rp. 323.586.300,-.

Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Negeri Sarolangun serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 24. Mutasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2020  
(dalam satuan rupiah)

Saldo per 31 Desember 2019	323.586.300
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	(323.586.300)
Saldo per 31 Desember 2020	323.586.300

Transaksi pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut: Mutasi Keluar sebesar Rp. 323.586.300,- merupakan penggunaan kembali Barang Milik Negara (BMN) yang sudah dihentikan penggunaannya dalam operasional pemerintah.

#### C.4. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban  
Jangka Pendek:  
Rp. 21.598.413,-*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember TA 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 21.598.413,- dan Rp. 8.139.268,-.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Perbandingan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019  
(dalam satuan rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019
Uang Muka dari KPPN	0	0
Utang Kepada Pihak Ketiga	21.598.413	8.139.268
Jumlah	21.598.413	8.139.268

Per tanggal 31 Desember 2020 terdapat kenaikan nilai Kewajiban sebesar Rp. 13.459.145,- atau sebesar 165,36 persen dari nilai per 31 Desember TA 2019.

##### C.4.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari  
KPPN:  
Rp. 0,-*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember TA 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang

persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

## C.5. Ekuitas

---

*Ekuitas:*  
*Rp.*  
**6.126.430.174,-**

Ekuitas per 31 Desember TA 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 6.126.430.174,- dan Rp. 5.570.961.886,-.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan PNBP: Rp. 3.787.854,-* Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 3.787.854,- dan Rp. 2.429.402,-.

Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 26. PNBP per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.787.854	2.429.402	1.358.452	55,91
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	0	0	0	0,00
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0	0,00
<b>Total Pendapatan</b>	<b>3.787.854</b>	<b>2.429.402</b>	<b>1.358.452</b>	<b>55,91</b>

### D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai: Rp. 2.794.342.872,-* Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 2.794.342.872,- dan Rp. 2.156.593.171,-.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 27. Beban Pegawai per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019  
(dalam satuan rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.031.105.040	954.094.760	77.010.280	8,07
Beban Pembulatan Gaji PNS	18.127	15.890	2.237	14,08
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	66.852.980	69.405.052	(2.552.072)	(3,68)
Beban Tunj. Anak PNS	20.420.570	18.858.266	1.562.304	8,28
Beban Tunj. Struktural PNS	28.140.000	30.010.000	(1.870.000)	(6,23)
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.266.290.000	749.880.000	516.410.000	68,87
Beban Tunj. PPh PNS	113.698.134	82.339.168	31.358.966	38,09
Beban Tunj. Beras PNS	52.287.240	50.683.360	1.603.880	3,16
Beban Uang Makan PNS	203.581.000	179.606.000	23.975.000	13,35
Beban Tunjangan Umum PNS	12.765.000	22.755.000	(9.990.000)	(43,90)
<b>Total Beban Pegawai</b>	<b>2.794.342.872</b>	<b>2.156.593.171</b>	<b>637.749.701</b>	<b>29,57</b>

### D.3. Beban Persediaan

*Beban Persediaan: Rp. 28.243.700,-*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 masing-masing sebesar Rp. 28.243.700,- dan Rp. 34.716.536,-.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 28. Beban Persediaan per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019  
(dalam satuan rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	28.243.700	34.716.536	(6.472.836)	(18,64)
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0,00
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0,00
<b>Total Beban Persediaan</b>	<b>28.243.700</b>	<b>34.716.536</b>	<b>(6.472.836)</b>	<b>(18,64)</b>

### D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban barang dan Jasa: Rp. 631.705.108,-*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 masing-masing sebesar Rp. 631.705.108,- dan Rp. 502.001.763,-.

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 29. Beban Barang dan Jasa per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	402.188.059	302.266.251	97.921.808	32,18
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.386.500	3.687.500	(301.000)	(8,16)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	32.040.000	37.240.000	(5.200.000)	(13,96)
Beban Barang Operasional Lainnya	36.202.355	35.017.475	1.184.880	3,38
Beban Bahan	10.687.100	10.788.500	(101.400)	(0,94)
Beban Langganan Listrik	83.323.992	77.071.741	6.252.251	8,11
Beban Langganan Air	12.473.400	19.479.400	(7.006.000)	(35,97)
Beban Langganan Telepon	7.104.439	13.725.126	(6.620.687)	(48,24)
Belanja Sewa	31.320.000	0	31.320.000	0,00
<b>Total Beban Barang dan Jasa</b>	<b>631.705.108</b>	<b>502.001.763</b>	<b>129.703.345</b>	<b>25,83</b>

## D.5. Beban Pemeliharaan

**Beban Pemeliharaan:**  
Rp.  
308.214.174,-

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 masing-masing sebesar Rp. 308.214.174,- dan Rp. 189.626.584,-.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 30. Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	238.334.734	117.848.734	120.486.000	102,24
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	65.328.340	61.289.100	4.039.240	6,59
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	0	300.000	(300.000)	(100,00)
<b>Total Beban Pemeliharaan</b>	<b>308.214.174</b>	<b>189.626.584</b>	<b>118.587.590</b>	<b>62,53</b>

## D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban  
Perjalanan  
Dinas: Rp.  
19.547.387,-*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 masing-masing sebesar Rp. 19.547.387,- dan Rp. 70.575.000,-.

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 31. Beban Perjalan Dinas per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	19.547.387	70.575.000	(51.027.613)	(72,30)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0,00
<b>Total Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>19.547.387</b>	<b>70.575.000</b>	<b>(51.027.613)</b>	<b>(72,30)</b>

Besarnya penurunan Beban Perjalanan Dinas di TA 2020 disebabkan karena Pandemi Covid-19 yang menyebabkan adanya pembatasan untuk kegiatan Perjalanan Dinas baik di dalam kota maupun ke luar kota.

## D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang  
untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat: Rp.  
0,-*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 32. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
<b>Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan Sosial : Rp 0,-*

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Rincian Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 33. Beban Bantuan Sosial per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
<b>Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan dan Amortisasi: Rp. 365.282.017,-*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 masing-masing sebesar Rp. 365.282.017,- dan Rp. 287.182.616,-.

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 34. Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	236.963.307	174.710.606	108.578.597	62,15
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	128.384.710	112.538.010	15.846.700	14,08
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	0	0	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0,00
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>365.282.017</b>	<b>287.182.616</b>	<b>78.099.401</b>	<b>27,19</b>
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud (Software)	0	0	0	0,00
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0,00
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>365.282.017</b>	<b>287.182.616</b>	<b>78.099.401</b>	<b>27,19</b>

## D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban  
Penyisihan  
Piutang tak  
Tertagih: Rp. 0,-*

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 35. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019  
(dalam satuan rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
<b>Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.11. Beban Lain-lain

**Beban Lain-Lain:** Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian atas Beban Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 36. Beban Lain-lain per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019  
(dalam satuan rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)	%
Beban Aset Extrakomtable Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Extrakomtable Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Extrakomtable Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
<b>Total Beban Lain-lain</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.12. Kegiatan Non Operasional

**Beban Kegiatan Non Operasional:** Pos Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian atas Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember

TA 2020 dan TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 37. Kegiatan Non Operasional per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)	%
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0,00
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0,00
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	87.500	(107.914)	195.414	(181,08)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	100.300	204.586	(104.286)	(50,97)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	12.800	312.500	(299.700)	(95,90)
<b>Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional</b>	<b>87.500</b>	<b>(107.914)</b>	<b>195.414</b>	<b>(181,08)</b>

### D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar Biasa: Rp. 0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 38. Pos Luar Biasa per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNBPN	0	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0,00
Beban Persediaan	0	0	0	0,00
<b>Total Pos Luar Biasa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

### E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal:* Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 masing-masing  
*Rp.* sebesar Rp. 5.570.961.886,- dan Rp. 5.548.317.487,-  
*5.570.961.886,-*

Nilai Ekuitas Awal TA 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 22.644.399,- dari TA 2019, yakni sebanyak 0,40 persen.

### E.2. Surplus/Defisit - LO

*Surplus/Defisit* Jumlah Surplus/Defisit - LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2020  
*LO: Rp.* dan TA 2019 masing-masing sebesar Rp. (4.143.459.904,-) dan Rp. (3.238.374.182,-).  
*(4.143.459.904,-)*

Surplus/Defisit - LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Nilai Surplus/Defisit – LO TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. (905.085.722,-) dari TA 2019, yakni sebanyak 27,94 persen.

### E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

*Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang Antara Lain Berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar* Rp. (200.080.250,-)  
*(200.080.250,-)*

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang Antara Lain Berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 masing-masing sebesar Rp. (200.080.250,-) dan Rp. (102.438.800,-).

Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang Antara Lain Berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 39. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019  
(dalam satuan rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0,00
Koreksi Atas Reklasifikasi	(1.996.500)	0	(1.996.500)	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	102.273.000	(102.273.000)	(100,00)
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	(198.083.750)	165.800	(198.249.550)	(119,57 1,50)
Koreksi Lain-lain	0	0	0	0,00
<b>Total Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas</b>	<b>(200.080.250)</b>	<b>102.438.800</b>	<b>(302.519.050)</b>	<b>(295,31)</b>

### E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

*Penyesuaian  
Nilai Aset: Rp. 0,-*

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

### E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai  
Persediaan: Rp.  
0,-*

Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 40. Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2020**  
(dalam satuan rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

### E.3.3. Koreksi Atas Reklasifikasi

*Koreksi Atas Reklasifikasi: Rp. (1.996.500,-)* Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 masing-masing sebesar Rp. (1.996.500,-) dan Rp. 0,-.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

### E.3.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap

*Selisih Revaluasi Aset Tetap: Rp. 0,-* Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 102.273.000,-.

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap.

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 41. Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2020**  
(dalam satuan rupiah)

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

### E.3.5. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

*Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi: Rp. (198.083.750,-)* Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 masing-masing sebesar Rp. (198.083.750,-) dan Rp. 165.800,-.

Nilai Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. (198.249.550,-) dari TA 2019, yakni sebanyak 119.571,50 persen.

### E.3.6. Koreksi Lain-lain

*Koreksi Lain-lain: Rp. 0,-* Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2020 dan TA 2019

masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Rincian Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 42. Koreksi Lain-lain per 31 Desember 2020**  
(dalam satuan rupiah)

Uraian	Koreksi
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	
Koreksi Kewajiban	
Koreksi Hibah	
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

#### E.4. Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar  
Entitas: Rp.  
4.899.008.442,-*

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 masing-masing sebesar Rp. 4.899.008.442,- dan Rp. 3.158.579.781,-.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Nilai Transaksi antar Entitas TA 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.740.428.661,- dari TA 2019, yakni sebanyak 55,10 persen.

#### E.5. Kenaikan/Penurunan Entitas

*Kenaikan/  
Penurunan  
Entitas: Rp.  
555.468.288,-*

Kenaikan/penurunan Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 masing-masing sebesar Rp. 555.468.288,- dan Rp. 22.644.399,-.

Nilai Kenaikan/penurunan Entitas TA 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 532.823.889,- dari TA 2019, yakni sebanyak 2.353,00 persen.

## E.6. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir:* Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2020 dan TA  
*Rp.*  
*6.126.430.174,-* 2019 masing-masing sebesar Rp. 6.126.430.174,- dan Rp. 5.570.961.886,-.

Nilai Ekuitas Akhir TA 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 555.468.288,- dari TA 2019, yakni sebanyak 9,97 persen.

## F. Pengungkapan Penting Lainnya

### F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

### F.2. Pengungkapan Lain-lain

#### F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut atas temuan BPK pada Laporan Keuangan Tahun 2020 maupun pada Laporan Keuangan Tahun lalu.

#### F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Terdapat belanja barang yang seharusnya dibayarkan bulan Desember 2020, namun ditangguhkan sampai dengan tahun 2020 yaitu berupa:
  1. Beban Langganan Listrik sebesar Rp. 6.829.095,-.
  2. Beban Langganan Telepon sebesar Rp. 611.500,-.
  3. Beban Langganan Internet sebesar Rp. 12.900.000,-.
2. Terdapat belanja pegawai yang seharusnya dibayarkan bulan Desember 2020, namun ditangguhkan sampai dengan tahun 2021 yaitu berupa:
  1. Beban Gaji Pokok PNS sebesar Rp. 1.916.800,-.
  2. Beban Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp. 409,-.
  3. Beban Tunjangan Suami/Istri PNS sebesar Rp. 149.170,-.
  4. Beban Tunjangan Anak PNS sebesar Rp. 46.804,-.
  5. Beban Tunjangan Fungsional PNS sebesar Rp. 1.600.000,-.
  6. Beban Tunjangan PPH PNS sebesar Rp. 240.004,-.

#### F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II adalah:

1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) KC. JAMBI A/C 0020-01-001174-30-9 a.n. BPg 012 Pengadilan Negeri Sarolangun yang digunakan sebagai Penampung DIPA

BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,-. Persetujuan Kembali Atas Pembukaan Rekening Milik Pengadilan Negeri Sarolangun guna memenuhi PMK Nomor: 252/PMK.05/2014 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja

#### **F.2.4. Revisi DIPA**

---

1. Revisi pertama dengan dokumen Nomor DIPA-005.01.2.477374/2020 Revisi ke 01 Tanggal 01 April 2020, Digital Stamp 7001-5005-4708-4012. Revisi tersebut merupakan revisi tanpa perubahan pagu.
2. Revisi Kedua dengan dokumen Nomor DIPA- 005.01.2.477374/2020 Revisi ke 02 Tanggal 02 Juli 2020, Digital Stamp 8218-6581-1506-2789 Revisi tersebut merupakan revisi tanpa perubahan pagu.
3. Revisi Ketiga dengan dokumen Nomor DIPA- 005.01.2.477374/2020 Revisi ke 03 Tanggal 12 Juli 2020, Digital Stamp 8218-6581-1506-2789 Revisi tersebut merupakan revisi tanpa perubahan pagu.
4. Revisi Keempat dengan dokumen Nomor DIPA- 005.01.2.477374/2020 Revisi ke 04 Tanggal 25 Juli 2020, Digital Stamp 8218-6581-1506-2789 Revisi tersebut merupakan revisi tanpa perubahan pagu.
5. Revisi Kelima dengan dokumen Nomor DIPA- 005.01.2.477374/2020 Revisi ke 05 Tanggal 20 Oktober 2020, Digital Stamp 8218-6581-1506-2789 Revisi tersebut merupakan revisi tanpa perubahan pagu.
6. Revisi Keenam dengan dokumen Nomor DIPA- 005.01.2.477374/2020 Revisi ke 06 Tanggal 01 Desember 2020, Digital Stamp 8218-6581-1506-2789 Revisi tersebut berupa Pengesahan POK terkait Akun Minus Belanja Pegawai.

#### **F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB**

---

Tidak ada Ralat SPM, SP2D, SSBP,SSPB

## F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Informasi koreksi LO atas transaksi belanja yang masih harus dibayar (utang pihak ketiga) pada belanja barang secara akrual Tahun Anggaran 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Terdapat Beban Langganan Listrik yang seharusnya dibayarkan bulan Desember 2020 sebesar Rp. 6.829.095,- namun ditangguhkan sampai dengan tahun 2021.
2. Terdapat Beban Langganan Telepon yang seharusnya dibayarkan bulan Desember 2020 sebesar Rp. 611.500,- namun ditangguhkan sampai dengan tahun 2021.
3. Terdapat Beban Langganan Internet yang seharusnya dibayarkan bulan Desember 2020 sebesar Rp. 12.900.000,- namun ditangguhkan sampai dengan tahun 2021.

Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 65/PA/SK/XII/2019 tanggal 02 Desember 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya, Pejabat yang diberi kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah Sekretaris Pengadilan Negeri Sarolangun. Dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 Pejabat Sekretaris adalah Juliadi, S.Kom. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : W5-U9/23/KP.00.3/1/2020 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Pengadilan Negeri Sarolangun; W5-U9/24/KP.00.3/1/2020 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Pada Pengadilan Negeri Sarolangun; W5-U9/25/KP.00.3/1/2020 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Staf Pengelola Anggaran/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Pada Pengadilan Negeri Sarolangun. Melalui Surat Keputusan Sekretaris Nomor : W5-U9/26/KP.00.3/1/2020 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Negara Bukan Pajak Pada Pengadilan Negeri Sarolangun maka nama-nama yang ditunjuk dan diangkat tersebut adalah sebagai berikut:

Pejabat Pembuat Komitmen : JULIADI, S.Kom  
Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM : BINNARIA DABUKKE, SH  
Bendahara Pengeluaran : RIZKY MADYA WULAN, S.T  
Bendahara Penerimaan, Staf Pengelola Keuangan, : TEGUH HARIADI, S.Kom  
PPABP

# *DAFTAR DAN LAMPIRAN*

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,  
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN  
NILAI BUKU ASET TETAP*

**Pengadilan Negeri Sarolangun**  
**Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap**  
**untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020**

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Total Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2020
A.	Tanah		699.300.000	-	-	-	699.300.000
1.	Tanah	-	699.300.000	-	-	-	699.300.000
B.	Peralatan dan Mesin		2.179.725.504	1.343.597.822	236.963.307	1.582.557.629	597.167.875
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor		540.861.264	223.861.264	45.285.714	269.146.978	271.714.286
2.	Alat Pengolahan		8.492.000	8.492.000	0	8.492.000	0
3.	Alat Kantor		199.087.400	114.378.090	32.273.580	149.646.420	49.440.980
4.	Alat Rumah Tangga		493.673.150	376.085.300	49.497.110	437.157.490	56.515.660
5.	Alat Studio		30.046.000	24.534.680	6.009.200	18.968.800	11.077.200
6.	Peralatan Pemancar		107.395.000	67.319.250	10.739.500	78.058.750	29.336.250
7.	Unit Alat Laboratorium		84.830.000	59.905.000	6.231.250	66.136.250	18.693.750
8.	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir		0	998.250	0	0	0
9.	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika		1.770.450	885.225	118.030	1.003.255	767.195
10.	Alat Khusus Kepolisian		14.998.500	5.624.438	3.749.625	9.374.063	5.624.437
11.	Komputer Unit		504.674.100	365.263.826	53.356.900	418.620.726	86.053.374

12.	Peralatan Komputer		193.897.640	96.250.499	29.702.398	125.952.897	67.944.743
C.	Gedung dan Bangunan		5.352.628.750	224.303.728	128.318.710	550.706.188	4.801.922.562
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja		4.031.764.750	158.551.936	95.442.814	452.078.500	3.579.686.250
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal		1.261.217.000	62.877.236	31.438.618	94.315.854	1.166.901.146
3.	Tugu/Tanda Batas		59.647.000	2.874.556	1.437.278	4.311.834	55.335.166
D.	Jalan dan Jembatan		30.792.000	30.792.000	0	30.792.000	0
1.	Jalan		30.792.000	30.792.000	0	30.792.000	0
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan		323.586.300	323.586.300	0	323.586.300	0
1.	Alat Kantor		87.805.000	87.805.000	0	87.805.000	0
2.	Alat Rumah Tangga		112.071.300	112.071.300	0	112.071.300	0
3.	Alat Komunikasi		3.080.000	3.080.000	0	3.080.000	0
4.	Komputer Unit		120.630.000	120.630.000	0	120.630.000	0
	<b>TOTAL</b>		<b>8.586.032.554</b>	<b>1.922.279.850</b>	<b>365.282.017</b>	<b>2.487.642.117</b>	<b>6.098.390.437</b>

## *B. Daftar Hibah Langsung*

**Pengadilan Negeri Sarolangun**  
**Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa**  
**untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020**

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
1-		-	-	-	-	-	-
			Jumlah :	-	-	-	-



005

01

1000

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER TAHUN 2020